

PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN

Leli Ramandani¹, Sirodjul Munir², Lina Marliani³

Universitas Galuh^{1,2,3}

E-mail: leliramandani23@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi belum optimalnya Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Hal tersebut terlihat dari Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kurang memberikan pelatihan kepada kelompok penggerak pariwisata, monitoring yang belum dilakukan dengan maksimal, dalam memberikan arahan pemanfaatan teknologi masih kurang, belum bersinergi baik dengan pihak lain serta pelestarian dan alokasi anggaran yang masih kurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan, yang terdiri dari observasi dan wawancara. Dengan informan sebanyak 4 (orang). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Pangandaran belum berjalan optimal, hal tersebut terlihat dari 19 indikator yang dijadikan tolak ukur, diantaranya 7 sudah berjalan dengan baik dan 12 belum sesuai pelaksanaannya. Hambatan-hambatan yang dihadapi berupa kurangnya partisipasi kompepar dan masyarakat dalam kegiatan pengembangan pariwisata, kurang dalam melakukan monitoring, kurang memberikan arahan kepada masyarakat, respon masyarakat yang masih kurang, kurang bersinergi, dan terbatasnya sumber anggaran.

Kata kunci : *Peran, Pengembangan Pariwisata*

PENDAHULUAN

Peran sektor pariwisata dalam pembangunan ekonomi di beberapa negara sudah tidak diragukan lagi sebagai penyumbang devisa negara, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan serta memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pariwisata menjadi salah satu sektor yang berpotensi untuk dikembangkan

sebagai sumber pendapatan daerah. Berbagai potensi wisata yang tersebar di setiap daerah tujuan wisata dilestarikan dan dikembangkan, karena dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif bagi pelestarian ekonomi, sosial dan budaya. pengembangan potensi pariwisata diharapkan bisa mendorong pembangunan ekonomi.

Pengembangan kawasan wisata

perlu direncanakan secara bertahap dan menyeluruh agar mencapai manfaat yang optimal bagi masyarakat. Undang-Undang Kepariwisata No. 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa pariwisata diperlukan untuk mendorong pemerataan, peluang usaha dan keuntungan, serta kemampuan menjawab tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun global.

Peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata terutama adalah menyediakan infrastruktur, perluasan berbagai objek, koordinasi, regulasi, dan promosi. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, menyediakan dan mengalokasikan beberapa infrastruktur yang berkaitan dengan kebutuhan pariwisata serta sebagai alat pemantauan kegiatan kepariwisataan agar potensi daerah dan tujuan wisata dapat lebih maksimal.

Objek wisata yang dikelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi wisata alam unggulan di Kabupaten Pangandaran salah satunya objek wisata Pantai Pangandaran, hal ini disebabkan karena objek wisata pantai Pangandaran memiliki daya tarik tersendiri seperti keindahan pasir hitam dan pasir putih yang ada disekitar area Cagar Alam Pananjung. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan permasalahan mengenai kurangnya peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan pariwisata Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Hal tersebut dapat terlihat dari indikator-indikator

sebagai berikut :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kurang optimal dalam mengembangkan daya tarik objek wisata dalam menyelenggarakan atraksi seni dan budaya. Hal ini terlihat dikawasan pantai pangandaran terdapat tempat untuk pertunjukan kesenian tradisional seperti ronggeng gunung, pencak silat, namun saat ini tempat tersebut tidak digunakan sesuai fungsinya sehingga tempatnya menjadi terbengkalai.
2. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan di kawasan pantai Pangandaran. Hal ini terlihat tidak ada pembagian area antara aktivitas berenang dan ojek perahu sehingga menyebabkan kegiatan kepariwisataan terganggu.
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum optimal dalam menerapkan sistem pembayaran tiket objek wisata secara non tunai melalui *QRIS* di pintu masuk utama (*toll gate*). Hal ini terlihat sebagian besar wisatawan belum mengetahui adanya transaksi non tunai sebagai pembayaran tiket objek wisata.

Berdasarkan permasalahan diatas maka dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan dalam bentuk rumusan masalah yaitu “Bagaimana

Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran?

KAJIAN TEORITIS

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2007:854) menyebutkan: “Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa”. Menurut Abdulsyani, (2016:94) mengemukakan bahwa : Peran adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas maka peran dapat diartikan dan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak atau kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia telah melakukan sebuahperanan.

Adapun 5 (lima) peran pemerintah Menurut Siagian, (2014:142), menyatakan bahwa peran pemerintah antara lain sebagai berikut :

1. Peran Selaku Stabilisator

Peran pemerintah selaku stabilisator yaitu dalam pemerintah harus mampu menciptakan adanya keadaan

politik, sosial dan ekonomi yang stabil. Oleh karena itu salah satu peran yang sangat penting yang harus dimainkan oleh pemerintah secara efektif yaitu peran stabilisator (Stabilitas di bidang politik, stabilitas ekonomi, stabilitas sosial).

2. Peran Selaku Inovator

Inovator, dalam memainkan peranan selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya

3. Peran Selaku Modernisator Modernisator,

Melalui pembangunan, setiap Negara ingin menjadi Negara yang modern. Berbagai implikasi pernyataan tersebut antara lain ialah kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan kemahiran manajerial.

4. Peran Selaku Pelopor

Peran selaku pelopor yaitu pemerintah harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat, seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin dengan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya dengan orientasi hasil yang semaksimal mungkin, kepeloporan dalam kejujuran seperti dalam pemberantasan korupsi dan kolusi, kepeloporan

dalam penegakan disiplin seperti dalam ketaatan pada jam kerja yang berlaku.

5. Peran Selaku Pelaksana Sendiri

Pelaksana sendiri yaitu, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata-mata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan Negara.

Pengembangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 “Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.

Menurut Muljaidi (2014:7) Pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan manusia ke daerah yang bukan merupakan tempat tinggalnya dalam waktu yang singkat dengan tujuan melakukan perjalanan bukan mencari nafkah atau kehidupan ditempat tujuan. Konsep pariwisata mengandung kata “perjalanan” (*tour*) yang dilakukan seseorang untuk melancong demi kesenangan sementara waktu, bukan untuk menetap atau bekerja.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif

kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 (orang), Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Bidang Pengelolaan Destinasi, dan pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2 (orang). Kemudian setelah data diperoleh maka dilakukan pengelolaan data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PEMBAHASAN

Adapun untuk mengetahui Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran berdasarkan 5 prinsip peran pemerintah menurut Siagian (2014:142) yang meliputi: peran selaku stabilisator, peran selaku inovator, peran selaku modernisator, peran selaku pelopor, peran selaku pelaksana sendiri. Untuk penjelasan lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

1. Peran Selaku Stabilisator

Peran pemerintah selaku stabilisator yaitu dalam pemerintah harus mampu menciptakan adanya keadaan politik, sosial dan ekonomi yang stabil. Oleh karena itu salah satu peran yang sangat penting yang harus dimainkan oleh pemerintah secara efektif yaitu peran stabilisator (Stabilitas di bidang politik, stabilitas ekonomi, stabilitas sosial). (Siagian, 2014:142).

a. Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan melestarikan seni budaya lokal di kawasan Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam melestarikan seni budaya lokal sudah dapat dikatakan sudah cukup baik, hal tersebut dibuktikan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selalu menampilkan kesenian tradisional dalam acara-acara tertentu seperti ulang tahun Kabupaten Pangandaran.

Ranjabar (2019:114) menyatakan bahwa: Pelestarian budaya lokal adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.

Dengan demikian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melestarikan seni budaya lokal di kawasan Pangandaran sudah berjalan dengan optimal sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Jacobus Ranjabar bahwa pelestarian budaya lokal dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya, maka dari itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pangandaran melestarikan seni budaya lokal untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada di kawasan Pangandaran.

b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memberikan pelatihan pada kelompok penggerak pariwisata dan masyarakat

Dalam pengembangan pariwisata Berdasarkan hasil

penelitian diketahui bahwa dalam memberikan pelatihan pada kelompok penggerak pariwisata dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih belum optimal. Karena fasilitas pendukung yang kurang memadai.

Sebagaimana menurut Rachmawati (dalam Mulyani 2008:110) pelatihan merupakan wadah lingkungan bagi karyawan, di mana mereka memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan.

Dengan demikian dalam memberikan pelatihan pada kelompok penggerak pariwisata dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih belum sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Rachmawati bahwa pelatihan merupakan wadah lingkungan bagi kelompok penggerak pariwisata dan masyarakat untuk mempelajari dan menambah pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata.

c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan sosialisasi kebudayaan tradisional di Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam melakukan sosialisasi kebudayaan tradisional di Pangandaran dapat dilakukan tetapi masih harus dioptimalkan lagi. Hal tersebut terlihat banyak yang belum mengetahui kebudayaan tradisional apa saja yang ada di Pangandaran.

Hambatan dalam melakukan sosialisasi kebudayaan tradisional di

Pangandaran yaitu kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dengan alasan adanya kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan serta waktu yang berbentrok antara kegiatan sosialisasi dan kepentingan pribadi serta kurang minatnya masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Upaya yang dilakukan agar kegiatan sosialisasi tetap bisa dilaksanakan yaitu dari pihak dinas melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman serta mengajak untuk masuk ke dalam komunitas dan juga mengenalkan kebudayaan melalui media sosial.

Menurut Sitorus (dalam Tina, 2019 : 13) : sosialisasi adalah proses pembelajaran masyarakat menghantar warganya ke dalam kebudayaan. Dengan demikian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melakukan sosialisasi kebudayaan tradisional di Pangandaran sudah cukup baik sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Sitorus bahwa sosialisasi merupakan proses pembelajaran yang diberikan kepada masyarakat untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap kebudayaan yang dimiliki.

2. Peran Selaku Inovator

Peran selaku inovator berarti pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru seperti temuan baru, metode baru, sistem baru dan cara berfikir baru.

a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan monitoring secara intens

Berdasarkan hasil penelitian

diketahui bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melakukan monitoring masih belum optimal. Hal tersebut terlihat nelayan yang melakukan kegiatannya di Pantai Pangandaran sehingga dapat mengganggu kenyamanan pengunjung, selain itu juga sampah dan limbah hotel yang belum terkendali secara maksimal.

Hambatan dalam melakukan monitoring yaitu adanya perbedaan pendapat sehingga menimbulkan konflik dengan masyarakat, serta sikap pegawai yang kurang bersedia melakukan monitoring secara rutin, kurangnya komitmen pegawai dalam mendukung keberhasilan.

Upaya yang telah dilakukan dalam melakukan monitoring yaitu dengan memberikan arahan dan petunjuk pada pegawai untuk melaksanakan monitoring kegiatan di objek wisata pantai pangandaran, memberikan pemahaman dan mengajak pada seluruh komponen yang terlibat untuk dapat mendukung program dalam rangka mengembangkan objek wisata.

Menurut Moerdiyanto (dalam Evan, 2019 :17) menyatakan bahwa: Monitoring merupakan aktivitas yang dilakukan pemimpin untuk, melihat, memonitoring jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian tujuan, melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Dengan demikian monitoring secara intens yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum

sesuai dengan apa yang dikatakan Moerdianto, bahwa monitoring di kawasan Pantai Pangandaran masih perlu ditingkakan lagi karena monitoring yang optimal dapat membuat kegiatan pariwisata lebih kondusif.

b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dikawasan Pantai Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dikawasan Pantai Pangandaran sudah berjalan dengan optimal. Hal tersebut terlihat adanya pemberian informasi pada masyarakat tentang keamanan objek wisata dari bahaya bencana yang bekerjasama dengan pihak BMKG dan untuk menjaga kondusifitas dari gangguan keamanan.

Menurut Darsono (dalam Tharra 2019:18) menyatakan bahwa lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitasnya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup lainnya.

Dengan demikian dalam menciptakan lingkungan yang kondusif di kawasan Pantai Pangandaran telah dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Darsono bahwa lingkungan yang kondusif dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Dimana dalam menciptakan lingkungan yang kondusif Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Pangandaran bekerjasama dengan stakeholder dan masyarakat agar dapat tercipta lingkungan yang kondusif.

c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengadakan musyawarah untuk memperoleh gagasan-gagasan baru dalam pengembangan pariwisata

Berdasarkan hasil penelitian diketahui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah dapat di katakan cukup baik. Hal tersebut terlihat adanya website bagi masyarakat atau wisatawan untuk memberikan masukan atau kritikan.

Menurut Ma'ruf (dalam Abdullah 2020:45) musyawarah merupakan majelis yang dibentuk untuk memperdengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya dan terorganisir dalam aturan.

Dengan demikian dalam mengadakan musyawarah untuk memperoleh gagasan-gagasan dalam pengembangan pariwisata sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Ma'ruf (dalam Abdullah 2020:45) , Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengadakan musyawarah untuk mendengar gagasan atau ide-ide dari masyarakat untuk pengembangan pariwisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki kreatifitas dalam pembayaran tiket masuk objek wisata dengan menerapkan pembayaran non tunai menggunakan QRIS.

Berdasarkan hasil penelitiann

dapat diketahui dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat kurangnya antrian panjang dalam pembayaran tiket masuk objek wisata karena pembayaran non tunai mempermudah serta dianggap lebih efektif.

Sebagaimana menurut Campbell (dalam Tina, 2019:22) menyatakan bahwa kreatifitas merupakan suatu kemampuan untuk menciptakan hasil yang sifatnya baru, inovatif belum ada sebelumnya, menarik, aneh dan berguna bagi masyarakat. Dengan demikian kreatifitas yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pangadaran dalam pembayaran tiket objek wisata menggunakan QRIS sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh David Cambell (dalam Tina, 2019:22) bahwa kreatifitas pembayaran tiket objek wisata menggunakan QRIS dapat memudahkan para pengunjung wisata.

d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki metode dalam pengembangan pariwisata dengan melakukan promosi destinasi wisata pantai pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui dalam melakukan promosi wisata pantai Pangandaran sudah berjalan dengan optimal. Hal tersebut terlihat banyak wisatawan yang datang ke Pantai Pangandaran karena melihat konten-konten yang di unggah oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengenai keindahan Pantai Pangandaran.

Sebagaimana menurut Marpaung

(dalam Yoeti, 2020:28) pengembangan ialah suatu upaya dalam memperbaiki daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi dan sudah melalui proses perencanaan yang matang, sehingga nantinya dalam pembangunan tidak terjadi hambatan. Dengan demikian metode dalam pengembangan pariwisata dengan melakukan promosi telah dilakukan dengan optimal sesuai dengan apa yang dinyatakan Marpaung, bahwa pengembangan dapat dilakukan melalui promosi melalui media sosial untuk memperkenalkan Pantai Pangandaran

3. Peran Selaku Modernisator

Peran selaku modernisator yaitu suatu usaha pemerintah untuk mengerakkan masyarakat ke arah kehidupan modern.

a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memberikan arahan pemanfaatan teknologi salah satunya pada pembayaran sistem non tunai

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam memberikan arahan pemanfaatan teknologi masih belum optimal. Hal tersebut terlihat masih banyak yang belum mengetahui serta kurang paham bagaimana melakukan pembayaran non tunai.

Hambatan dalam memberikan arahan pemanfaatan teknologi yaitu sarana dan prasarana yang terbatas serta kurang stabilnya jaringan yang menjadi kendala dalam memberikan arahan pemanfaatan teknologi. Upaya yang dilakukan dalam memberikan arahan pemanfaatan teknologi yaitu dengan melakukan sosialisasi dan

pelatihan mengenai pemanfaatan teknologi salah satunya sistem pembayaran non tunai.

Sebagaimana menurut School (dalam Ninik, Masrullah dan Umirarso, 2020): “Moderniator adalah sesuatu informasi, suatu perubahan dalam segala aspek- aspeknya. Sehingga dapat dikatakan bahwa modernitas merupakan sebuah transformasi yang dialami oleh masyarakat yang dimana terjadi perubahan yang menorah kepada perkembangan dan perubahan ke arah yang lebih baik.” Dengan demikian memberikan arahan pemanfaatan teknologi pada pembayaran non tunai masih merupakan transformasi pada perubahan ke arah yang lebih baik.

b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mampu mengelola destinasi wisata pantai pangandaran menjadi daya tarik wisata

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah mampu mengelola destinasi wisata pantai pangandaran, namun belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut terlihat tersedianya sarana dan prasarana di kawasan Pantai Pangandaran yang dapat menunjang pengembangan pariwisata Pantai Pangandaran.

Upaya yang dilakukan agar tetap mampu mengelola destinasi pariwisata Pantai Pangandaran dengan mengajukan proposal permohonan anggaran agar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pangandaran tetap

mampu mengelola destinasi wisata Pantai Pangandaran.

Sebagaimana menurut Pratama (dalam Tina, 2019:27) menyatakan bahwa pengelolaan berarti proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain. Dengan demikian bahwa pengelolaan perlu dilakukan sebagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam melestarikan objek wisata.

c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Paangandaran sudah melakukan pemberdayaan masyarakat, namun belum berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pangandaran mengadakan pelatihan namun masih kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pelatihan untuk meningkatkan kualitas masyarakat.

Hambatan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas masyarakat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang baik. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat secara langsung dan perlahan untuk

mengikuti pelatihan guna meningkatkan kualitas masyarakat.

Sebagaimana menurut Sumaryadi (dalam Mardikanto 2017:51) pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemauan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas masyarakat belum berjalan optimal sesuai dengan apa yang dinyatakan Sumaryadi, bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pangandaran dalam melakukan pemberdayaan bertujuan untuk merubah mindset masyarakat.

d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan perubahan dengan penataan infrastruktur dikawasan pantai pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Pariwisata sudah optimal dalam melakukan perubahan dengan penataan infrastruktur di kawasan Pantai Pangandaran. Hal tersebut terlihat adanya penataan melalui pembangunan-pembangunan seperti pedestrian jalan kaki, tempat duduk, jembatan penyebrangan dan toilet.

Sebagaimana menurut Rosana (dalam Tina, 2019 : 23-24) menyatakan bahwa: modernisator sangat erat dengan perkembangan ke arah kemajuan. Manusia akan selalu membuat inovasi untuk mempermudah kehidupannya dan itu berdampak

kepada perubahan pola pikir masyarakat yang tadinya irasional menjadi rasional. Cepat atau lambat sistem masyarakat sudah dipastikan akan berubah entah itu kearah kemajuan atau malah kemunduran.

Dengan demikian di era modernisasi banyak pemerintah membuat inovasi yang dapat melakukan perubahan, seperti perubahan dengan penataan infrastruktur dikawasan Pantai Pangandaran.

4. Peran Selaku Pelopor

Peran selaku pelopor yaitu pemerintah harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin dengan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya dengan orientasi hasil yang maksimal mungkin.

a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat berkomunikasi dengan berbagai pihak dalam mengembangkan pariwisata

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak sudah berjalan dengan optimal. Hal tersebut terlihat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berkomunikasi dengan berbagai pihak misalnya dengan instansi- instansi lain dalam mengembangkan pariwisata.

Sebagaimana menurut Paramita (dalam Yasir: 2020:58) menyatakan bahwa: Komunikasi sekarang berkembang pesat seiring perkembangan jaman teknologi.

Penggunaan komunikasi dalam berbidang tertentu juga mengalami perkembangan. Salah satunya adalah berkembang ke arah bidang pariwisata. Komunikasi pariwisata merupakan salah satu bukti perkembangan komunikasi dalam sektor pariwisata. Hal tersebut bisa terjadi karena pariwisata memiliki potensi besar sebagai salah satu sarana komunikasi.

Dengan demikian bahwa komunikasi yang baik dapat membantu pengembangan pariwisata seperti mengkomunikasikan destinasi, mengkomunikasikan sumber daya kepada wisatawan dan seluruh stakeholder pariwisata.

b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat bersinergi dengan baik antara swasta dan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kurang dapat membangun sinergitas yang baik dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Hal ini misalnya dengan bersinergi dengan pihak pengusaha penginapan dan hotel dan juga dengan kompepar.

Hambatan dalam bersinergi dengan baik antara swasta dan masyarakat yaitu masih kurang terlaksana dengan baik seperti dengan adanya areal pembelanjaan. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan komunikasi secara intens dengan pihak swasta, memberikan penjelasan dan pemahaman pada masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah.

Sebagaimana menurut Walton (dalam Dewi, 2020:45) menyatakan bahwa: sinergi merupakan hasil upaya kerjasama atau *co-opertive effort*, karena itu inti dari proses untuk menghasilkan kualitas sinergi adalah kerjasama.

Dengan demikian bersinergi dengan baik antara swasta dan masyarakat belum berjalan baik sesuai apa yang dinyatakan Wilton (dalam Dewi, 2020:45), bahwa bersinergi dapat menciptakan solusi atau gagasan yang lebih baik dan inovatif dari bekerjasama,

c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyediakan alokasi anggaran untuk mengembangkan potensi pariwisata

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alokasi anggaran untuk mengembangkan potensi pariwisata masih kurang memadai karena beberapa pendukung pengembangan pariwisata masih belum dapat dilaksanakan.

Hambatan yang dihadapi yaitu alokasi anggaran yang kurang memadai. Upaya yang dilakukan yaitu mengajukan permohonan penambahan alokasi anggaran pada pemerintah daerah dan tentunya mencari sumber dana dari pihak investor dengan melakukan kerja sama.

Sebagaimana menurut Govindarajan (dalam Dewi, 2020:50) menyatakan bahwa anggaran sebagai sebuah rencana keuangan, biasanya mencakup periode satu tahun dan merupakan alat-alat untuk perencanaan jangka pendek dan pengendalian.

Dengan demikian anggaran merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui dalam menyusun sebuah rencana awal yang akan dikeluarkan untuk melakukan memanfaatkan potensi pariwisata.

d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bekerja dengan produktif dalam meningkatkan potensi pariwisata

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dinas sudah bekerja dengan produktif dalam meningkatkan potensi pariwisata. Hal ini terlihat dinas sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Sebagaimana menurut Hasibuan (dalam Mulyani, 2008:67) menyatakan bahwa: produktivitas adalah perbandingan antara output (hasil) dengan input (masukan). Jika produktivitas naik akan meningkatkan efisiensi (waktu-bahan-tenaga) dan sistem kerja, teknik produksi dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya.

Dengan demikian bahwa produktivitas sangat berpengaruh pada keberhasilan dinas dalam menjalankan kegiatannya karena produktivitas dapat mencerminkan kemampuan pegawai dalam melakukan suatu pekerjaan dan memperoleh hasil dilakukan.

e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pelestarian lingkungan dikawasan Pantai Pangandaran

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa dalam melakukan pelestarian lingkungan dikawasan

Pantai Pangandaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih kurang optimal. Hal ini terlihat kurangnya tempat sampah dan membuat sampah membludak dan beserakan yang dapat mengganggu kenyamanan ketika berwisata di Pantai Pangandaran.

Hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya koordinasi dengan pihak lain. Upaya yang dilakukan dalam melakukan pelestarian lingkungan yaitu memperbanyak jumlah tempat sampah dan bekerjasama serta berkoordinasi dengan para stakeholder.

Sebagaimana menurut Orbasli (dalam Dewi, 2020:38) menyatakan bahwa pelestarian adalah suatu proses, berupa susunan kegiatan memahami, melindungi merawat dan menerapkan tindakan sesuai situasi dan kondisi setempat (bangunan bersejarah) untuk mempertahankan makna kulturalnya.

Dengan demikian pelestarian dilakukan untuk meningkatkan sikap individu dalam melestarikan lingkungan agar tetap bersih, sehat dan nyaman ketika wisatawan berkunjung ke kawasan Pantai Pangandaran.

5. Peran Selaku Pelaksana Sendiri

Yaitu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan harus dilakukan oleh pemerintah tanpa bantuan atau di serahkan kepada pihak lain.

a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menetapkan kebijakan dalam mengembangkan pariwisata

Pantai Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui dalam menetapkan kebijakan dalam mengembangkan pariwisata Pantai Pangandaran, namun belum berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan.

Hambatan dalam menetapkan kebijakan untuk mengembangkan pariwisata yaitu kurang mempunyai sumber daya manusia yang menjadikan masyarakat bingung ketika ada suatu kebijakan baru.

Upaya yang dilakukan dalam menetapkan kebijakan melakukan sosialisasi terkait kebijakan baru serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.

Sebagaimana menurut Anastasia (dalam Muljadi 2014:57) menyatakan bahwa: “Kebijakan pariwisata sebagai regulasi, aturan pedoman, arah, dan sasaran pembangunan atau promosi serta strategi yang memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan individu maupun kolektif yang secara langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang sekaligus kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi”

Dengan demikian kebijakan merupakan sebuah keputusan atau ketetapan pemerintah agar kepariwisataan dapat berjalan dengan efektif. Maka dari itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menetapkan kebijakan agar kepariwisataan di kawasan Pantai Pangandaran dapat

berjalan dengan efektif dan kondusif.

b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membuat program berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata

Berdasarkan hasil penelitian dalam menjalankan program berkelanjutan belum berjalan dengan optimal, karena masih banyak sampah serta air laut yang tercemar menyebabkan belum terpenuhinya syarat untuk menjadikan pariwisata Pantai Pangandaran sebagai tujuan wisata berkelas dunia.

Hambatan dalam membuat program berkelanjutan untuk pengembangan pariwisata yaitu kurangnya sarana prasarana seperti tempat sampah dan rambu himbauan untuk menjaga lingkungan.

Upaya dalam membuat program berkelanjutan yaitu melakukan penataan infrastruktur dan mengelola sumber daya dengan cara memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sebagaimana menurut Federation of Nature and National Parks (dalam Muljadi 2014:76) menjelaskan bahwa: Pariwisata berkelanjutan merupakan segala bentuk pembangunan, pengelolaan dan aktivitas pariwisata harus memperhatikan tentang integritas lingkungan, ekonomi, sosial dan kesejahteraan dari sumber daya alam dan budaya yang ada untuk jangka waktu yang lama.

Dengan demikian program berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata masih belum optimal sesuai,

bahwa pariwisata berkelanjutan yaitu membuat masa depan pariwisata jangka panjang lebih layak dan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum berjalan dengan optimal. Dilihat dari 5 dimensi dan 19 indikator yang dijadikan alat ukur terdapat 7 indikator yang sudah berjalan dengan baik dan 12 indikator lainnya belum sesuai dalam pelaksanaan. Seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pangandaran dalam memberikan pelatihan pada kelompok penggerak pariwisata dan masyarakat masih kurang optimal, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melakukan monitoring secara intens belum optimal, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam memberikan arahan pemanfaatan teknologi masih belum optimal, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pangandaran belum dapat bersinergi dengan baik antara pihak swasta dan masyarakat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menyediakan alokasi anggaran untuk memanfaatkan potensi pariwisata belum memadai, pelestarian lingkungan dikawasan Pantai Pangandaran belum optimal. Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pangandaran yaitu d memberikan pelatihan pada kelompok penggerak

pariwisata dan masyarakat dengan mengajukan permohonan sejumlah anggaran, memberikan arahan dan pemahaman kepada pegawai untuk melakukan monitoring secara intens dan pemanfaatan teknologi, memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk mematuhi keijakan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdulsyani. 2016. Sosiologi dan Perubahan Masyarakat. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Mardikanto, Totok dan Soesbianto, Poerwoko. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik: Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
- Muljadi dan Andri Warman. 2014. Kepariwisatan Dan Perjalanan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muljadi. 2014. Kepariwisataan dan Perjalanan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyani Sri. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Media Nusantara.
- Ninik, Marullah, Umiarso. 2020. Modernisasi. Jakarta: Ar- Ruzz Media.
- Oka, Yoeti. 2020. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta Timur: PT BalaiPustaka.
- Ranjabar Jacobus. 2019. Sistem Sosial Budaya Indonesia. Bogor :Ghalia Indonesia.

- Siagian Sondang. P, 2014. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Yasir. 2020. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jurnal-jurnal :**
- Abdullah, Dudung. 2020. Musyawarah dalam AL-Qur'an. *Jurnal Ad-Daulah*. Vol.3(2).
- Amalia Tharra. 2019. Pengaruh Lingkungan Fisik Terhadap Tingkat Kunjungan Wisatawan. *Administrasi Negara Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Dewi Fitria Anggraeni., Bambang Triono. 2020. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Kesenian Budaya Lokal. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 2(1) 3-4.
- Evan Himawan, Saragih, Putu Agung Bayapati. 2019. *Pengembangan Bussiness Intelligence Dashboard Untuk Monitoring Aktivitas Pariwisata.Teknologi Komunikasi dan Informatika: UniversitasUdayana Bandung*.
- Tina. 2019. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisat Pulau Camba Cambang Kabupaten Pangkep. *Administrasi Negara Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Dokumen:**
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 Tentang Pengembangan